



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213  
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, Fax. (0721) 254895

Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id> / Pos-el : [inspektorat@lampungprov.go.id](mailto:inspektorat@lampungprov.go.id)

### NOTULENSI

- Rakorwasda : Rakorwasda Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
- Hari/Tanggal : Jumat /22 Desember 2023
- Pukul : 08.30 WIB s.d selesai
- Tempat : Hotel Novotel Bandar Lampung
- Acara : 1. Laporan oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung  
2. Pengantar dan Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
3. Pembahasan Rakorwasda dan Gelarwasda Tahun 2024  
4. Kesimpulan dan Penutup
- Notulen : Ahmad Rozi Subing, SH JF Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung
- Peserta : 1. Inspektur/ Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung  
2. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
3. Irbn ,II,III, dan IV  
4. Kasubag Perencanaan, Kasubag Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung  
5. JF Perencana Muda Inspektorat Provinsi Lampung  
6. Unsur Perencanaan dan Staf di Lingkungan Inspektorat Prov.Lampung
- Laporan Inspektur Provinsi Lampung : Rakorwasda dengan Inspektorat Kabupaten dan Kota merupakan sebuah agenda Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di tahun 2024 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
- Rakorwasda tahun 2024 untuk menyusun Jakwas, agar pengawasan dapat besinergi dengan Inspektorat Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung dalam penguatan APIP serta pengawalan program Pengawasan Tematik yakni Pengawasan Pengurangan Kemiskinan, Pengangguran Terbuka , Pengendalian Inflasi, Penanganan Stunting Peningkatan Investasi, dan Reformasi Birokrasi (Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Memfasilitasi Inspektorat Kabupaten dan Kota membuka Jasa Konsultasi dan Rencana Kebutuhan Permintaan Audit.
- Sambutan Sekda Provinsi Lampung : Pencegahan Korupsi dan Pembinaan Pengawasan di Provinsi Lampung, telah dilaksanakan berbagai aktifitas yang bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain: Penguatan Komitmen Kepala

Daerah dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan, Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat (*whistleblowing system*) dan Unit Pengandali Gratifikasi yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) , Pelayanan Publik Layanan Online Pengaduan Masyarakat (SPAN LAPOR) Bersama KEMENPAN RB.

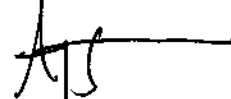
Selain itu untuk tahun 2024, diminta kepada Inspektur untuk melakukan kegiatan Pengawasan Ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti audit investigative, audit keuangan, pemeriksaan ketaatan dan lain-lain.

Dalam Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2024 :

1. Agar Gubernur Lampung melalui APIP Provinsi Lampung memfasilitasi Rencana Kebutuhan Audit dan Jasa Konsultasi Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Lampung
2. Pembinaan dan Pengawasan Tematik yang harus di Prioritas Kan dalam Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2024;
3. Pembinaan dan Pengawasan Urusan Umum dan Teknis Oleh Inspektorat Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Gubernur Wakil Pemerintah Pusat) yang terdiri dari 9 Aspek Pengawasan Umum dan 32 Urusan Pemerintahan Teknis;
4. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah di Provinsi dan di masing-masing Kabupaten/Kota.

3. Kesimpulan :
- a. Adanya Jasa Konsultasi dan Rencana kebutuhan Permintaan Audit Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Lampung
  - b. Agar Inspektur Kabupaten dan Kota Melakukan Pengawasan ke BUMD;
  - c. adanya persamaan persepsi dalam mensinergikan kegiatan pengawasan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terkait temuan BPK.
  - d. Penguatan Kelembagaan untuk melaksanakan tugas semua lrbn dapat mengawal pengawasan Prioritas Nasional dan Pembangunan serta Pengelolaan Keuangan secara Baik dan Transparansi dan Pengawasan Tematik sebagai di tuangkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2023.

NOTULIS,



AHMAD ROZI SUBING,SH